



**PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR**

**2026**

**LAPORAN  
KINERJA  
TRIWULAN I**



**Disusun Oleh:**

**Pemerintah Kecamatan  
Simpang Empat**



**Situs Website**

[kecamatan-simpangempat.banjarkab.go.id](http://kecamatan-simpangempat.banjarkab.go.id)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan laporan yaitu untuk:

- a. memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat;
- b. memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Simpang Empat;
- c. memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan; dan
- d. menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan laporan yaitu:

- a. sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat kepada Bupati;
- b. salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Simpang Empat; dan
- c. sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Simpang Empat.

### **B. Tugas dan Fungsi**

#### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan yang dipimpin oleh Camat mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
9. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **2. Fungsi**

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

## **3. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
  - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

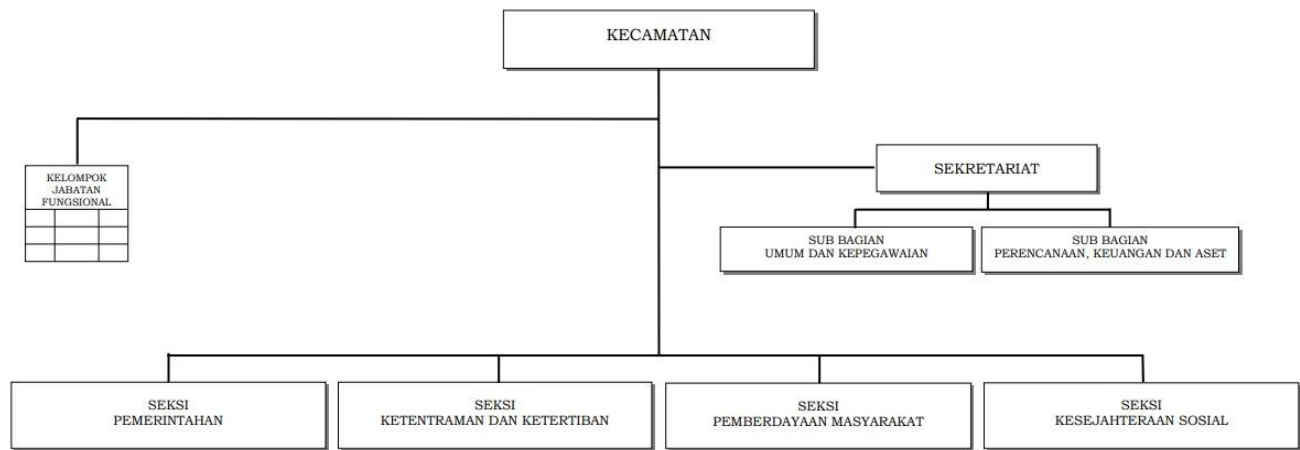
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 12);
- l. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
- m. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);
- n. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 12);
- o. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 53).

#### **4. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terdiri dari:

- 1. Camat.
- 2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- 3. Kepala Seksi Pemerintahan ;
- 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- 7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



**Gambar Bagan SOTK Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Uraian Tugas masing-masing unit perangkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

**a. Camat**

- 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 11) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**b. Sekretaris Camat**

- 1) menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;

- 2) memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- 3) menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- 4) menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
- 6) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
5. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
7. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
8. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
9. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
10. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
11. membuat Daftar Urut Kepadangan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;

12. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
13. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**

1. merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
3. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
4. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
6. menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan Kecamatan;
7. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
8. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
10. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
12. menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
14. menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;

15. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan

16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

### **c. Seksi Pemerintahan**

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;

2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;

3. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);

4. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;

5. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;

6. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;

7. melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

8. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;

9. menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

10. membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;

11. melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;

12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
6. melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
8. melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
10. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
11. menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **e. Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
2. pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
4. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
5. pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan

bencana lainnya;

6. pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
7. pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

**f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
5. melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
6. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
7. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
  - a. penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
  - c. perpustakaan desa;
  - d. bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
  - e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - f. pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
  - g. pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
  - h. pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
  - i. penyusunan data profil desa/kelurahan;
  - j. pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
  - k. pembinaan desa miskin/tertinggal;
  - l. penataan ruang kawasan terpadu;
  - m. peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;

- n. identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
  - o. rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
8. mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
  9. fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
  10. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
  12. menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### **g. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

### **C. Isu Strategis**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator utama keberhasilan kinerja pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Di Kecamatan Simpang Empat, "**peningkatan kualitas pelayanan publik**" menjadi isu strategis yang terus diupayakan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik, seperti belum optimalnya standar pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum meratanya kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan prima. Selain itu, masih terdapat persepsi masyarakat terhadap proses pelayanan yang dianggap kurang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Simpang Empat. Upaya tersebut

meliputi penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, penguatan pengawasan dan evaluasi pelayanan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. Di samping itu, penting juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Dengan menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai isu strategis, Kecamatan Simpang Empat diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang prima, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel Isu Strategis Kecamatan Simpang Empat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN	PERMASALAHAN KECAMATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN			ISU STRATEGIS KECAMATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan yang optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan publik yang belum optimal</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal</li> <li>3. Kapasitas ASN masih terbatas</li> </ol>	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan kualitas pelayanan publik

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, khususnya instansi pemerintah. IKU menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh, relevan dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi.

Kecamatan Simpang Empat menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan melalui Keputusan Camat Simpang Empat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGAN JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kesesuaian persyaratan,</li> <li>- Prosedur pelayanan,</li> <li>- Kecepatan pelayanan,</li> <li>- Kewajaran biaya,</li> <li>- Kompetensi petugas,</li> <li>- Prilaku petugas pelayanan,</li> <li>- Penanganan pengaduan,</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana.</li> </ul> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang memengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan</p>	$IKM = \left( \frac{\sum \text{Total nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \right) \times 25$	Camat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	<p>Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)</p> <p>Aspek yang dinilai meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek Administrasi,</li> <li>- Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,</li> <li>- Aspek Pelayanan Publik,</li> <li>- Aspek Kesejahteraan Sosial,</li> <li>- Aspek Ketentraman dan Ketertiban,</li> <li>- Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan</li> <li>- Aspek Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>	$\left( \frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \right) \times 100\%$	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil.</p>	$\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$ <p>Komponen penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan kinerja 30%</li> <li>2) Pengukuran kinerja 30%</li> <li>3) Pelaporan kinerja 15%</li> <li>4) Evaluasi internal 25%</li> </ol> <p>Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sub-komponen keberadaan 20%</li> <li>2) Sub-komponen kualitas 30%</li> <li>3) Sub-komponen pemanfaatan 50%</li> </ol> <p>Kategori penilaian:</p> <p>AA : &gt; 90 – 100 (Sangat Memuaskan)  A : &gt; 80 – 90 (Memuaskan)  BB : &gt; 70 – 80 (Sangat Baik)  B : &gt; 60 – 70 (Baik)  CC : &gt; 50 - 60 (Cukup Memadai)  C : &gt; 30 – 50 (Kurang)  D : &gt; 0 – 30 (Sangat Kurang)</p>	Camat	LHE Perangkat Daerah

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, target kinerja Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sebagai berikut :

Tabel 1  
Sasaran Strategis dan Sasara Kinerja Perangkat Daerah

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan I	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \left( \frac{\sum \text{Total nilai persepsi}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \right) \times 25$	90,5	NA	Nilai	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMNAN DAN KETERTIBAN UMUM 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	321.093.000	Camat
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	$\left( \frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \right) \times 100\%$	100	NA	Nilai	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMNAN DAN KETERTIBAN UMUM 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	321.093.000	Camat
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	$\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$	81	NA	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.485.242.400	Camat

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan I	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\sum$ (Unsur kinerja utama x 40%) + ( Unsur kepatuhan x 30%) + ( Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	96	NA	Indeks	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.884.007.500	Sekcam
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	$\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	30%	Persentase	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.586.000	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	$\frac{\sum \text{Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	25%	Persentase	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.832.340.000	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	$\frac{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah yang tersusun}}{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	25%	Persentase	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.420.000	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	$\frac{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan}}{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	25%	Persentase	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.360.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	$\frac{\sum \text{Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran yang dilaksanakan}}{\sum \text{Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	25%	Persentase	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.712.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	$\frac{\sum \text{Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Rencana Kebutuhan}} \times 100 \%$	100%	85%	Persentase	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.994.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan I	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
			$\sum$ Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan						
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	$\frac{\sum \text{Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	25%	Persentase	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.419.600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	$\frac{\sum \text{Jasa Pemeliharaan BMD yang dilaksanakan}}{\sum \text{Jasa Pemeliharaan BMD yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	25%	Persentase	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.410.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
13	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	$\frac{\sum \text{penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	0%	Persentase	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.680.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	25%	Persentase	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.174.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
15	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	$\frac{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	25%	Persentase	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat	26.494.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan I	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
16	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	81.25%	Persentase	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.409.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
17	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	$\frac{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	81.25%	Persentase	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.409.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
18	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Pengaduan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diterima}} \times 100 \%$	100%	81.25%	Persentase	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
19	Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Gangguan Keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Gangguan Keamanan dan ketertiban yang terjadi}} \times 100 \%$	100%	0%	Persentase	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMNAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.910.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
20	Terseleenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\sum \text{Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	0%	Persentase	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.940.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
21	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{pengaduan Urusan Keamanan dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100 \%$	100%	0%	Persentase	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
22	Terseleenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	$\frac{\sum \text{Koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkara yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	0%	Persentase	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.970.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulanan I	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
		dan Peraturan Kepala Daerah	$\sum$ Koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang direncanakan						
23	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	$\frac{\sum \text{Koordinasi koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	12.5%	Persentase	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	168.570.000	Kepala Seksi Pemerintahan
24	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	$\frac{\sum \text{Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	12.5%	Persentase	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	168.570.000	Kepala Seksi Pemerintahan
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diterima}} \times 100 \%$	100%	12.5%	Persentase	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	Kepala Seksi Pemerintahan
26	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	$\frac{\sum \text{Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi yang Baik}}{\sum \text{Desa di Wilayah Kecamatan Simpang Empat}} \times 100 \%$	100%	18.75%	Persentase	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.030.000	Kepala Seksi Pemerintahan
27	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\sum \text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana}}{\sum \text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan}} \times 100 \%$	100%	18.75%	Persentase	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.030.000	Kepala Seksi Pemerintahan

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Realisasi/Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulanan I	Satuan	Realisasi TW I	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5	NA	Nilai	NA	NA	Kegiatan ini dalam tahap pengumpulan data kuesioner
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	100	NA	Nilai	NA	NA	Belum dilaksanakan Penilaian EKK
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	NA	Nilai	NA	NA	Belum dilaksanakan penilaian SAKIP
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	96	NA	Indeks	NA	NA	Belum dilaksanakan penilaian IKKI
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100%	30%	Persentase	30%	100%	
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100%	25%	Persentase	25%	100%	
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100%	25%	Persentase	25%	100%	
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100%	25%	Persentase	25%	100%	
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100%	25%	Persentase	25%	100%	
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100%	85%	Persentase	85%	100%	
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	25%	Persentase	25%	100%	
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	25%	Persentase	25%	100%	
13	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	100%	0%	Persentase	0%	0%	Kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulanan I	Satuan	Realisasi TW I	Capaian (%)	Keterangan
		Daerah yang Ada di Kecamatan						
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100%	25%	Persentase	25%	100%	
15	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	25%	Persentase	25%	100%	
16	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	81.25%	Persentase	81.25%	100%	
17	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	81.25%	Persentase	81.25%	100%	
18	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	100%	81.25%	Persentase	81.25%	100%	
19	Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	0%	Persentase	0%	0%	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II, III dan IV
20	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0%	Persentase	0%	0%	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II dan Triwulan III
21	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	0%	Persentase	0%	0%	
22	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	0%	Persentase	0%	0%	Kegiatan dilaksanakan di Triwulan IV
23	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100%	12.5%	Persentase	12.5%	100%	
24	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	12.5%	Persentase	12.5%	100%	
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	12.5%	Persentase	12.5%	100%	
26	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%	18.75%	Persentase	18.75%	100%	
27	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	18.75%	Persentase	18.75%	100%	

#### A.1. Penjelasan hasil capaian target kinerja:

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target kinerja 90,50 dengan satuan nilai untuk realisasi pada triwulan I saat ini belum dapat dicantumkan karena penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Namun telah dilaksanakan beberapa tahapan persiapan antara lain:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diantaranya pengarahan kepada pejabat terkait agar membuat dokumen standar Pelayanan yang jelas dan transparan serta melibatkan unsur masyarakat dalam pembuatannya.
- Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan yaitu mengarahkan pejabat terkait untuk mengadakan pelatihan ataupun pengembangan SDM pelayanan publik, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, etika sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat .
- Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan publik yaitu mengarahkan pejabat terkait untuk mengoordinasikan dengan sub bagian perencanaan terkait penyediaan sarana dan prasarana tempat / ruangan pelayanan publik, terutama untuk masyarakat difabel.
- Mengarahkan pejabat terkait untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan rutin setiap hari pada saat penerima layanan selesai melakukan pengurusan dokumen/ rekomendasi dengan mengisi format SKM, tetapi Survey kepuasan masyarakat ini tidak hanya dilakukan melalui isian format skm saja tetapi juga dilaksanakan dengan cara berdialog antara pemberi layanan dan penerima layanan dan melalui scan barcode yang disediakan oleh Kecamatan.
- Mengarahkan pejabat terkait untuk dapat menyediakan/ memfasilitasi kotak saran dan pengaduan yaitu tempat/ wadah untuk menampung saran, kritik dan pengaduan dari masyarakat penerima layanan.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan setiap bulan, untuk mengetahui kendala- kendala yang ada saat pemberian pelayanan.

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan pengampu Indikator Kinerja adalah Camat Simpang Empat dengan target kinerja tahun 2026 adalah sebesar 100 dengan satuan Nilai, untuk realisasi pada triwulan I untuk saat ini belum dapat dicantumkan karena penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan IV sehingga realisasi dan capaian dari sasaran strategis pada triwulan I belum bisa disampaikan.

Nilai Evaluasi Kecamatan secara operasional didefinisikan berupa pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi di kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu :

1. Aspek Administrasi,

2. Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
3. Aspek Pelayanan Publik,
4. Aspek Kesejahteraan Sosial,
5. Aspek Ketenteraman dan Ketertiban,
6. Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan
7. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Namun demikian dilaksanakan beberapa tahapan persiapan dalam rangka mendukung kegiatan penilaian kinerja ini antara lain:

- Memimpin rapat intern kecamatan terkait pembagian tugas penilaian Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan
- Menugaskan kepada masing- masing pengampu aspek penilaian untuk melakukan pengecekan kembali terkait bahan dan data dukung seluruh aspek yang diminta .
- Mengarahkan pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Mengarahkan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
- Mengarahkan agar pelaksanaan Fasilitasi musrenbang desa dan kecamatan, fasilitasi penyusunan RKP desa, pembinaan APBDes terlaksana sesuai ketentuan.

3. Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja adalah Camat Simpang Empat dengan target kinerja tahun 2026 adalah sebesar 81 dengan satuan Nilai, untuk realisasi pada triwulan I untuk saat ini belum dapat dicantumkan karena penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan III, sehingga realisasi dan capaian dari sasaran strategis pada triwulan I belum bisa disampaikan. Namun demikian telah dilaksanakan beberapa tahapan persiapan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penilaian antara lain:

- Perencanaan Kinerja
  1. Mengarahkan pejabat terkait untuk menyelesaikan penyusunan Dokumen Renstra dan dokumen Reviu Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029.
  2. Mengarahkan pejabat terkait untuk menghimpun data PK Tahun 2026.
  3. Mengarahkan pejabat terkait untuk menghimpun data rencana Aksi tahun 2026
- Pengukuran Kinerja
  1. Menetapkan IKU Kecamatan Simpang Empat Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam PK.
  2. Mengarahkan Pejabat terkait untuk menghimpun data dan menyusun laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2026
- Pelaporan Kinerja  
Pelaporan Kinerja Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan

- Evaluasi Internal

Memimpin pelaksanaan rapat evaluasi Kinerja bulanan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Simpang Empat.

4. Sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Simpang Empat dengan Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat, sasaran ini merupakan sasaran kinerja Sekretaris Kecamatan Simpang Empat, capaian masih kosong dikarenakan belum ada penilaian IKKI yang dilaksanakan.

Dalam rangka persiapan penilaian dimana Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dilakukan terhadap unsur Kinerja Utama, Kepatuhan dan Kinerja Pelayanan Publik, meliputi:

1. Kepatuhan

- a. proses bisnis dan tata laksana;
- b. tata kelola pengadaan barang dan jasa;
- c. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. keandalan laporan keuangan;
- e. pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. efektivitas pengendalian korupsi; dan
- g. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Kinerja Pelayanan publik

- a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. inovasi pelayanan publik;
- c. keterbukaan informasi publik; dan
- d. pelayanan pengaduan.

5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan, dengan target Triwulan I sebesar 30%, realisasi capaian 30% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi telah dilaksanakan secara tepat waktu, sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dengan target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah di Kecamatan Simpang Empat telah berjalan optimal dari sisi pemenuhan target. Namun demikian, untuk mencapai kinerja yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, perlu dilakukan

pergeseran fokus dari sekadar kepatuhan administratif menuju peningkatan kualitas substantif pengelolaan keuangan dan aset daerah.

7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah dengan target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah berhasil melaksanakan pengelolaan dan pengamanan aset daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk mencapai kinerja yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek kualitas data, pengamanan legalitas aset, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset daerah.
8. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu dengan target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa seluruh proses administrasi kepegawaian telah dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi serta diselesaikan secara tepat waktu. Hal tersebut menunjukkan adanya pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, efektif, dan didukung oleh koordinasi yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Meskipun capaian telah maksimal, ke depan perlu terus dilakukan upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian, khususnya dalam hal ketepatan data, kecepatan pelayanan, serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian. Dengan demikian, kinerja yang telah dicapai tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan untuk mendukung profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran dengan target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh fasilitasi penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran telah terlaksana dengan baik, sesuai kebutuhan organisasi, serta tepat waktu. Kelancaran administrasi perkantoran ini menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara keseluruhan. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan adanya pengelolaan administrasi yang tertib, koordinasi yang baik, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Ke depan, perlu terus dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan penerapan sistem yang lebih efisien, guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih.

10. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dengan target 85%, realisasi capaian 85% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini mencerminkan bahwa proses pengadaan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan, baik dari sisi ketepatan perencanaan, kesesuaian spesifikasi, maupun ketepatan waktu pelaksanaan. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan pengadaan yang matang serta pelaksanaan yang efektif dan terkoordinasi dengan baik. Keberhasilan tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran operasional perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, perlu terus dilakukan peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pengadaan, termasuk optimalisasi efisiensi anggaran dan pemanfaatan barang, agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
11. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi, serta dilaksanakan secara tepat waktu. Ketersediaan jasa penunjang yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keberhasilan ini juga mencerminkan adanya perencanaan yang baik, pengelolaan yang efektif, serta koordinasi yang optimal dalam penyediaan jasa penunjang. Ke depan, perlu terus dilakukan peningkatan kualitas layanan jasa, efisiensi penggunaan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan agar capaian kinerja yang telah diraih dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan.
12. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemeliharaan telah dikelola dan dipelihara dengan baik sesuai kebutuhan serta jadwal yang telah direncanakan. Pemeliharaan yang optimal tersebut berkontribusi terhadap terjaganya kondisi sarana dan prasarana sehingga tetap layak digunakan dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya pengelolaan yang tertib, perencanaan

pemeliharaan yang baik, serta dukungan sumber daya yang memadai. Ke depan, perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pemeliharaan melalui perencanaan yang lebih tepat, pengawasan yang berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

13. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan belum terlaksana, kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026.
14. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan telah terlaksana sesuai dengan rencana dan kebutuhan, serta dilaksanakan secara tepat waktu. Hal ini mencerminkan adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan serta efektivitas peran kecamatan dalam mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa fungsi koordinatif dan fasilitatif telah berjalan dengan baik dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas fasilitasi, serta optimalisasi peran kelembagaan agar capaian kinerja yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
15. Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan camat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, rencana kerja, serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan, serta kemampuan kecamatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara baik dan bertanggung jawab. Keberhasilan tersebut juga menggambarkan adanya koordinasi yang solid, kepatuhan terhadap regulasi, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan

16. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan target 81.25%, realisasi capaian 81.25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat telah terlaksana sesuai dengan rencana dan kebutuhan. Hal ini mencerminkan peran aktif kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah kecamatan, desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan kualitas fasilitasi, peningkatan inovasi program pemberdayaan, serta optimalisasi peran masyarakat agar hasil yang dicapai tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

17. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan target 81.25% realisasi capaian 81.25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dalam pemberdayaan desa telah terlaksana sesuai dengan rencana dan kebutuhan, serta berjalan secara efektif dan tepat waktu. Hal ini mencerminkan peran aktif kecamatan dalam mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan desa serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa fungsi koordinatif kecamatan telah berjalan dengan baik dalam mendukung peningkatan kapasitas desa dan optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas fasilitasi, serta pengembangan inovasi pemberdayaan desa agar capaian kinerja yang telah diraih dapat dipertahankan dan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pembangunan desa.

18. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti, target 81.25%, capaian 81.25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat terkait urusan pemberdayaan desa yang menjadi target telah berhasil ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini mencerminkan meningkatnya responsivitas pemerintah kecamatan dalam menampung, menangani, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara efektif.

19. Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti, sasaran kinerja ini belum dapat disampaikan pada triwulan I karena kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV.
20. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sasaran kinerja ini belum dapat disampaikan pada triwulan I karena kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III.
21. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti, pada triwulan I tahun 2026, terdapat pengaduan yang telah ditindaklanjuti yaitu berkaitan dengan informasi kebencanaan dari desa yang telah ditindaklanjuti dengan meneruskan ke BPBD Kabupaten Banjar.
22. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sasaran kinerja ini belum dapat disampaikan pada triwulan III karena kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
23. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan target 12.5%, realisasi capaian 12.5% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum telah terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan efektivitas peran kecamatan dalam menjalankan fungsi koordinatif serta memastikan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Keberhasilan tersebut juga menggambarkan adanya sinergi yang baik antar instansi serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas fasilitasi, serta optimalisasi peran kecamatan dalam menjaga stabilitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum, sehingga capaian kinerja yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
24. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target 12.5%, realisasi capaian 12.5% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian

ini menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi penugasan dari kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan kebutuhan di wilayah kecamatan. Hal ini mencerminkan komitmen dan kemampuan kecamatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan tugas. Ke depan, perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran kecamatan dalam mendukung stabilitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, sehingga capaian kinerja yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

25. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan target 12.5%, realisasi capaian 12.5% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat terkait urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang menjadi target telah berhasil ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan meningkatnya responsivitas dan akuntabilitas pemerintah kecamatan dalam menangani pengaduan masyarakat serta memastikan penyelesaian permasalahan secara efektif.

26. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik dengan target 18.75%, realisasi capaian 18.75% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Keberhasilan tersebut juga menggambarkan adanya peningkatan tertib administrasi desa yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan pembinaan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital agar kualitas tata kelola administrasi desa semakin baik, merata, dan berkelanjutan.

27. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 18.75%,

realisasi capaian 18.75% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi, serta koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan peran aktif kecamatan dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan tertib, sesuai regulasi, dan akuntabel. Keberhasilan tersebut juga menggambarkan adanya koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

## **A.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target kinerja 90,5 dengan satuan nilai untuk realisasi pada triwulan III saat ini belum dapat dicantumkan karena penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

### *Faktor Pendukung:*

- *Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.*
- *Adanya pembagian tugas yang jelas dan terarah dari pimpinan.*

### *Faktor Penghambat:*

- *Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kecamatan yang masih minim sehingga pembagian pekerjaan belum dapat dipetakan secara optimal.*
- *Sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum memadai*
- *Sarana dan prasarana belum ramah disabilitas*

### *Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi dengan BPSDM berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*
- *Berkoodinasi dengan Bappedalitbang dan BPKPAD berkaitan dengan usulan penambahan sarana dan prasaran penunjang pelayanan*
- *Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas*

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan pengampu Indikator Kinerja adalah Camat Simpang Empat dengan target kinerja tahun 2026 adalah sebesar 100 dengan satuan Nilai, untuk saat ini belum dapat dicantumkan karena penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

*Faktor Pendukung:*

- *Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.*

*Faktor Penghambat:*

- *Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kecamatan yang masih minim*
- *Sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum memadai*
- *Sarana dan prasarana belum ramah disabilitas*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi dengan BPSDM berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*
- *Berkoodinasi dengan Bappedalitbang dan BPKPAD berkaitan dengan usulan penambahan sarana dan prasaran penunjang pelayanan*
- *Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas*

3. Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja adalah Camat Simpang Empat dengan target kinerja tahun 2026 adalah sebesar 81 dengan satuan Nilai, untuk realisasi pada triwulan I belum dapat dicantumkan karena penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

*Faktor Pendukung:*

- *Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.*

*Faktor Penghambat:*

- *Belum ada informasi yang jelas terkait waktu pelaksanaan penilaian*
- *Minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan.*
- *Minimnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan.*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi Inspektorat berkaitan dengan tahapan/jadwal pelaksanaan penilaian.*
- *Berkoordinasi dengan BPSDM berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*
- *Berkoodinasi dengan Bappedalitbang dan BPKPAD berkaitan dengan usulan penambahan sarana dan prasaran penunjang pelayanan*

4. Sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Simpang Empat dengan Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat,

sasaran ini merupakan sasaran kinerja Sekretaris Kecamatan Simpang Empat, untuk realisasi pada triwulan I belum dapat dicantumkan karena penilaian akan dilaksanakan pada Triwulan III/IV.

*Faktor Pendukung:*

- *Kerjasama dan komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan.*

*Faktor Penghambat:*

- *Dokumen belum terarsipkan dengan baik.*

*Alternatif Solusi:*

- *Optimalisasi Penggunaan Inovasi berupa Google Drive Sadar Administrasi*

5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan, dengan target Triwulan I sebesar 30%, realisasi capaian 30% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%,

*Faktor Pendukung:*

- *Adanya dukungan pimpinan dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja.*
- *Komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.*
- *Penyampaian laporan yang tepat waktu*

*Faktor Penghambat:*

- *Orientasi pelaksanaan kegiatan masih pada penyerapan anggaran, belum sepenuhnya pada pencapaian output dan outcome.*
- *Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan terutama yang menangani bagian perencanaan.*
- *Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi berbasis web di lingkup kecamatan*

*Alternatif Solusi:*

- *Penguatan Budaya Kerja dengan mendorong orientasi pada Hasil (outcome).*
- *Peningkatan kapasitas SDM yang ada secara berkelanjutan.*
- *Optimalisasi pemanfaatan aplikasi sederhana melalui google drive*

6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat

Daerah sesuai Ketentuan, target 25%, realisasi 25%, capaian sampai dengan triwulan I tahun 2026 adalah 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Kerjasama yang baik dari seluruh pegawai lingkup kecamatan dalam penyusunan Laporan baik bulanan maupun triwulanan*

*Faktor Penghambat:*

- *Perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang dinamis menyebabkan penyesuaian yang tidak selalu cepat.*
- *Sistem aplikasi SIPD yang sering bermasalah.*
- *Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan terutama yang menangani bagian keuangan.*

*Alternatif Solusi:*

- *Koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dengan perangkat daerah terkait apabila ada perubahan regulasi/peraturan tentang pengelolaan keuangan.*
- *Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan*

7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah, target 25%, realisasi 25%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Tersedianya pedoman terkait perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, hingga penghapusan aset*
- *Dukungan Pimpinan dalam mewujudkan tertib administrasi dan pengamanan aset.*

*Faktor Penghambat:*

- *Penatausahaan aset di Kecamatan masih belum tertib.*
- *Kuantitas maupun Kapasitas SDM yang menangani BMD di Kecamatan masih sangat terbatas.*
- *Pengamanan aset di Kecamatan masih belum optimal.*

*Alternatif Solusi:*

- *Inventarisasi aset secara berkala dalam rangka tertib administrasi aset.*
- *Peningkatan kapasitas SDM pengelola aset*
- *Penguatan pengamanan aset meliputi pemberian label/kodefikasi barang, penyediaan tempat penyimpanan yang aman.*

8. Sasaran Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu, target 25%, realisasi 25%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait*
- *Motivasi SDM yang ada di kecamatan untuk mengikuti kegiatan Bimtek*

*Faktor Penghambat:*

- *Kurangnya wawasan dan informasi kepegawaian yang berdampak pada keterlambatan pengusulan kepegawaian*
- *Data Kepegawaian yang belum terhimpun secara sistematis*
- *Belum tersedianya jadwal kegiatan bimtek/diklat*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi dengan BPSDM berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*

9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran, target 25%, realisasi 25%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Kerjasama yang baik di lingkungan internal kecamatan*
- *Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait*

*Faktor Penghambat:*

- *Staf pelaksana yang merangkap tugas sehingga kurang memperhatikan pelaksanaan fasilitasi*
- *Tamu yang datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkonsultasi dengan BKPSDM Kab Banjar berkaitan dengan jumlah pegawai di Kecamatan Simpang Empat yang masih kurang.*
- *Menyediakan/memfasilitasi penyediaan konsumsi untuk tamu.*

10. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan, target 85%, realisasi 85%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Kerjasama dan komunikasi yang baik antar pihak.*

*Faktor Penghambat:*

- *Harga barang di pasaran yang cenderung fluktuatif sehingga berpengaruh terhadap penganggaran dan realisasi belanja.*
- *Penggunaan E-Katalog PBJ V.6 belum terimplementasi secara maksimal*
- *Kesulitan dalam menganggarkan peralatan yang sesuai kebutuhan karena data disistem penganggaran yang terbatas dan tidak tersedia.*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi/berkonsultasi dengan subbag perencanaan, keuangan dan aset untuk usulan Standar Harga Satuan yang belum tersedia di sistem.*

11. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi, target 25%, realisasi 25%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait*

*Faktor Penghambat:*

- *Data surat menyurat belum terhimpun secara sistematis.*

*Alternatif Solusi:*

- *Menghimpun data kedalam satu wadah agar dapat terhimpun secara sistematis dan tertib yaitu folder google drive SADAR ADMINISTRASI.*

12. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara target 25%, realisasi 25%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait*

*Faktor Penghambat:*

- *Data aset kecamatan yang belum terhimpun dengan baik dan teratur*
- *Penyedia layanan service AC yang jauh dari kantor kecamatan*
- *Data pajak kendaraan bermotor belum terhimpun dengan baik*
- *Kurangnya SDM Kecamatan yang menangani aset.*

*Alternatif Solusi:*

- *Menghimpun data kedalam satu wadah agar dapat terhimpun secara sistematis dan tertib yaitu folder google drive SADAR ADMINISTRASI.*
- *Berkoordinasi dengan BPSDM berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*

13. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.*
- *Adanya arahan dan dukungan dari pimpinan*

*Faktor Penghambat:*

- *Jumlah sdm kecamatan yang masih minim.*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi dengan BPSDM berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*

14. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.*

*Faktor Penghambat:*

- *Pemanfaatan digitalisasi yang belum optimal*
- *Keterlibatan unsur masyarakat dalam kegiatan kesejahteraan sosial masih belum optimal*

*Alternatif Solusi:*

- *Mengusulkan sarana dan prasarana pelayanan publik*
- *Aktif mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial*

15. Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada

Camat target 25%, realisasi capaian 25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.*

*Faktor Penghambat:*

- *Keterlibatan unsur masyarakat dalam kegiatan kesejahteraan sosial masih belum optimal*

*Alternatif Solusi:*

- *Aktif mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial*

16. Sasaran kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana, target 81.25%, realisasi 81.25%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Dukungan regulasi dan program dari pemerintah pusat maupun daerah terkait Program Koperasi Desa Merah Putih*
- *Adanya dukungan dari pimpinan terkait pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Simpang Empat.*
- *Adanya potensi lokal masyarakat yang bisa dikembangkan baik dari segi Ekonomi (UMKM), sosial maupun budaya masyarakat di Kecamatan Simpang Empat.*

*Faktor Penghambat:*

- *Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masih rendah.*
- *Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.*
- *Kapasitas SDM Pengurus KDMP di Kecamatan Simpang masih terbatas.*
- *Sinkronisasi tugas dan fungsi antara pemerintah kecamatan dengan Perangkat Daerah teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat masih belum optimal.*

*Alternatif Solusi:*

- *Aktif mensosialisasikan/menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh skpd serta mendorong masyarakat ikut aktif dalam kegiatan*
- *Mendorong pendekatan partisipatif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat*
- *Pendampingan/fasilitasi KDMP secara berkelanjutan.*
- *Penyelarasan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan pihak terkait.*

17. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan target 81.25%, realisasi 81.25%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- Tersedianya aturan dan mekanisme pelaksanaan Musrenbang dari pusat hingga daerah
- Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun lintas sektor di Kecamatan Simpang Empat
- Adanya potensi lokal masyarakat yang bisa dikembangkan baik dari segi Ekonomi (UMKM), sosial maupun budaya masyarakat di Kecamatan Simpang Empat.
- 

*Faktor Penghambat:*

- Kurangnya kesadaran dan pemahaman aparat desa terhadap regulasi terbaru.
- Masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman, keterampilan, literasi digital, dan wawasan usaha, yang menyebabkan kegiatan pemberdayaan belum berjalan optimal.
- Kamus usulan yang ditetapkan oleh SKPD pada pelaksanaan pra musrenbang ataupun musrenbang kecamatan masih terbatas sehingga tidak semua usulan bisa diakomodir di dalam Sistem Informasi (SIPD).
- 

*Alternatif Solusi:*

- Mendorong pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan pra musrenbang maupun musrenbang kecamatan
- Pendampingan dalam penginputan data pada kegiatan pra-Musrenbang
- Perbaikan manajemen pelaksanaan Musrenbang terutama terkait Fasilitasi diskusi yang efektif dalam penyusunan prioritas usulan.
- Aktif mensosialisasikan/menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh skpd serta mendorong masyarakat ikut aktif dalam kegiatan

18. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti, target 81.25%, realisasi 81.25%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.

*Faktor Penghambat:*

- *Kamus usulan yang ditetapkan oleh SKPD pada pelaksanaan pra musrenbang ataupun musrenbang kecamatan masih terbatas sehingga tidak semua usulan bisa diakomodir di dalam Sistem Informasi (SIPD).*

*Alternatif Solusi:*

- *Menyarankan kepada Operator Desa untuk dapat menyampaikan usulan proposal secara terpisah (tidak melalui kegiatan musrenbang) kepada Dinas terkait untuk dimasukkan dalam Renja Dinas tersebut.*

19. Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum dengan indikator Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti, kegiatan akan di laksanakan pada triwulan II, III dan IV.

*Faktor Pendukung:*

- *Adanya dukungan dari Pimpinan*
- *Koordinasi yang terjalin dengan baik antar instansi dan lintas sektor*

*Faktor Penghambat:*

- *Belum terintegrasinya sistem pencatatan dan pelaporangangguan keamanan dan ketertiban*
- *Minimnya SDM yang menangani seksi ketenteraman dan ketertiban.*
- *Rendahnya kepatuhan warga terhadap Peraturan Daerah (Perda), serta perilaku resisten dari pelanggar (misal: warung remang-remang).*
- *Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan luas wilayah, kurangnya tenaga ahli, dan tingkat keterampilan/pengetahuan yang perlu ditingkatkan.*

*Alternatif Solusi:*

- *Mendorong pembentukan dan pengaktifan pos kamling serta peran tokoh masyarakat dalam pelaporan dini.*
- *Menghimpun database serta menyusun format laporan seksi ketenteraman dan ketertiban untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.*
- *Menyusun dan melaporan secara tertulis hasil kegiatan trantibum kepada Camat.*
- *Koordinasi dengan Lintas Sektor untuk memantau situasi kondusif.*

20. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kegiatan akan di laksanakan pada triwulan II dan III.

*Faktor Pendukung:*

- *Adanya dukungan dari Pimpinan*
- *Koordinasi yang terjalin dengan baik antar instansi dan lintas sektor*

*Faktor Penghambat:*

- *Koordinasi masih bersifat insidental, dilakukan saat terjadi gangguan, belum sepenuhnya bersifat preventif.*
- *data Bakesbangpol ada sekitar 600 Organisasi Masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Banjar, namun hanya sekitar 200 Organisasi Masyarakat yang melaporkan ke Bakesbangpol.*
- *Kegiatan terkait kebencanaan belum didukung anggaran yang memadai.*
- *Kurangnya SDM seksi ketenteraman dan ketertiban*

*Alternatif Solusi:*

- *Peningkatan dokumentasi dan pelaporan kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban*
- *Melaksanakan Pendekatan preventif berbasis koordinasi dengan melakukan pemetaan wilayah rawan gangguan trantib secara bersama lintas instansi.*
- *Mengoptimalkan grup komunikasi lintas sektor untuk respon cepat gangguan trantib*

21. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti.

*Faktor Pendukung:*

- *Adanya arahan dan dukungan dari pimpinan*

*Faktor Penghambat:*

- *Jumlah Linmas di desa masih terbatas dan belum merata, sehingga belum optimal dalam mendukung pengamanan kegiatan masyarakat maupun penanganan gangguan ketertiban di Desa.*

*Alternatif Solusi:*

- *Mendorong dan memberikan sosialisasi kepada linmas desa tentang pentingnya pengamanan dan penanganan gangguan ketertiban di Desa*

22. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

*Faktor Pendukung:*

- *Dukungan Pimpinan dan Tersedianya dana anggaran dan kesiapan sarana dan prasarana.*
- *Tersedianya Perda dan Perkada sebagai dasar penerapan dan penegakan hukum*
- *Koordinasi lintas sektor dan antar instansi yang terjalin dengan baik*
- 

*Faktor Penghambat:*

- *Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan baik itu Perda maupun Perkada*
- *Keterbatasan kewenangan aparatur kecamatan, Penindakan langsung masih sangat bergantung pada Satpol PP dan aparat kepolisian.*

*Alternatif Solusi:*

- *Melaksanakan operasi gabungan secara berkala bersama Satpol PP, TNI, dan Polri.*
- *Melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi Perda/Perkada*
- *Melaksanakan Pendekatan persuasif dan humanis dengan mengedepankan pembinaan sebelum penindakan untuk meningkatkan kepatuhan.*

23. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan target 12.5%, realiasi 12.5 %, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Adanya regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan*

*Faktor Penghambat:*

- *Jumlah sdm kecamatan yang masih minim sehingga penataan administrasi seksi Pemerintahan masih belum optimal.*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi dengan BPSDM berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*
- *Mengusulkan penambahan peralatan seperti komputer dan printer*

24. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target 12.5%, realiasi 12.5 %, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Adanya arahan dan dukungan dari pimpinan*

*Faktor Penghambat:*

- *Jumlah sdm kecamatan yang masih minim sehingga penataan administrasi seksi Pemerintahan masih belum optimal.*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi dengan sub bagian umpeg berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*

25. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti target 12.5%, realiasi 12.5 %, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan koordinasi yang baik lintas sektor.*
- *Komitmen aparatur kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara cepat dan sesuai prosedur*

*Faktor Penghambat:*

- *Kualitas dan kelengkapan informasi pengaduan yang belum memadai, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk verifikasi.*
- *Belum optimalnya sistem pengelolaan pengaduan berbasis digital, sehingga proses masih bersifat manual dan kurang terintegrasi.*
- *Tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata, baik dalam menyampaikan pengaduan maupun dalam memberikan data pendukung.*

*Alternatif Solusi:*

- *Penguatan sistem pengelolaan pengaduan berbasis digital, agar lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.*
- *Peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam penanganan pengaduan, komunikasi publik, dan analisis permasalahan.*

26. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik, target 18,75%, realiasi 18,75%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait.*

*Faktor Penghambat:*

- *Tingkat Pemahaman Regulasi yang masih rendah.*
- *kurangnya sdm yg mumpuni dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi dengan subbag umpeg berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*
- *Aktif menyampaikan informasi ke pihak Desa apabila ada regulasi terbaru dan terupdate.*

27. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik dengan target 18,75%, realiasi 18,75%, capaian 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Adanya arahan dan dukungan dari pimpinan*

*Faktor Penghambat:*

- *Beberapa desa belum konsisten dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu, yang berdampak pada proses rekapitulasi data dan pelaporan kecamatan ke tingkat kabupaten*
- *Jumlah sdm kecamatan yang masih minim sehingga penataan administrasi seksi Pemerintahan masih belum optimal.*
- *kurangnya sdm yg mumpuni dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.*

*Alternatif Solusi:*

- *Berkoordinasi dengan subbag umpeg berkaitan dengan usul penambahan pegawai di Kecamatan.*
- *Aktif mendorong dan mensosialisasikan berkaitan dengan pelaksanaan penyampaian laporan yang tepat waktu*
- *Aktif menyampaikan informasi ke pihak Desa apabila ada regulasi.*

### **A.3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kinerja sasaran strategis ini ditunjang oleh beberapa program diantaranya:

- *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*
- *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*
- *Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum*
- *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*

- *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diantaranya pengarahan kepada pejabat terkait agar membuat dokumen standar Pelayanan yang jelas dan transparan serta melibatkan unsur masyarakat dalam pembuatannya.
- Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan yaitu mengarahkan pejabat terkait untuk mengadakan pelatihan ataupun pengembangan SDM pelayanan publik, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, etika sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat .
- Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan publik yaitu mengarahkan pejabat terkait untuk mengoordinasikan dengan sub bagian perencanaan terkait penyediaan sarana dan prasarana tempat / ruangan pelayanan publik, terutama untuk masyarakat difabel.
- Mengarahkan pejabat terkait untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan rutin setiap hari pada saat penerima layanan selesai melakukan pengurusan dokumen/ rekomendasi dengan mengisi format SKM, tetapi Survey kepuasan masyarakat ini tidak hanya dilakukan melalui isian format skm saja tetapi juga dilaksanakan dengan cara berdialog antara pemberi layanan dan penerima layanan dan melalui scan barcode yang disediakan oleh Kecamatan.
- Mengarahkan pejabat terkait untuk dapat menyediakan/ memfasilitasi kotak saran dan pengaduan yaitu tempat/ wadah untuk menampung saran, kritik dan pengaduan dari masyarakat penerima layanan.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan setiap bulan, untuk mengetahui kendala- kendala yang ada saat pemberian pelayanan.

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan, Program pendukung:

- *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*
- *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*
- *Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum*
- *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*
- *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Memimpin rapat intern kecamatan terkait pembagian tugas penilaian Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan
- Menugaskan kepada masing- masing pengampu aspek penilaian untuk melakukan pengecekan kembali terkait bahan dan data dukung seluruh aspek yang diminta .

- Mengarahkan pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai ketentuan.
  - Mengarahkan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
  - Mengarahkan agar pelaksanaan Fasilitasi musrenbang desa dan kecamatan, fasilitasi penyusunan RKP desa, pembinaan APBDes terlaksana sesuai ketentuan.
3. Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Program yang mendukung sasaran kinerja ini adalah *Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota*, kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran kinerja ini antara lain:
- Perencanaan Kinerja
    1. Mengarahkan pejabat terkait untuk menyelesaikan penyusunan Dokumen Renstra dan dokumen Reviu Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029.
    2. Mengarahkan pejabat terkait untuk menghimpun data PK Tahun 2026.
    3. Mengarahkan pejabat terkait untuk menghimpun data rencana Aksi tahun 2026
  - Pengukuran Kinerja
    1. Menetapkan IKU Kecamatan Simpang Empat Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam PK.
    2. Mengarahkan Pejabat terkait untuk menghimpun data dan menyusun laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2026
  - Pelaporan Kinerja
 

Pelaporan Kinerja Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan
  - Evaluasi Internal
 

Memimpin pelaksanaan rapat evaluasi Kinerja bulanan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Simpang Empat.
4. Sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan Simpang Empat dengan Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat, Program yang menunjang kegiatan ini yaitu *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, adapun kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung kinerja sasaran ini antara lain:
- Mengoordinir penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Kepatuhan, meliputi:
    - a) Penyusunan Dokumen Probis
    - b) SiRUP
    - c) SK Satgas SPIP
    - d) Dokumen Penilaian Resiko
    - e) Laporan Keuangan 2025 Audited
    - f) RKBMD
    - g) Berita Acara Penetapan Pemegang BMD
    - h) Dokumen pengeluaran barang berupa SPB dan SPPB

- i) Dokumen Laporan Mutasi Barang
- j) Bukti pemasangan label pada BMD
- k) Identifikasi benturan Kepentingan
- l) Kampanye anti gratifikasi
- m) Dokumen DUK Bezetting dan daftar nominatif Pegawai
- n) Dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan
- Mengoordinir penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Pelayanan Publik, meliputi:
  - a) Pengisian Kuesioner SKM
  - b) Maklumat Pelayanan
  - c) Tersedianya Website dan sarana Pengaduan
  - d) Terdapat dokumentasi Inovasi
- Mengoordinir pelaksanaan rapat internal Kecamatan dalam rangka pembagian tugas dan penyiapan data dukung penilaian IKKI Kecamatan Simpang Empat.

5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan, Kegiatan yang mendukung Sasaran Kinerja ini yaitu *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*, meliputi:

1. Penyusunan dokumen Renja Tahun 2027
2. Penyusunan Dokumen LKJIP tahun 2025
3. Laporan RFK bulan Januari tahun 2026
4. Laporan RFK bulan Februari tahun 2026
5. Laporan RFK bulan Maret tahun 2026
6. Laporan kinerja triwulan I Tahun 2026

6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan, kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*, meliputi:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (10 Dokumen)
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025 (1 Dokumen).

7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah, Kegiatan yang mendukung Sasaran Kinerja ini yaitu *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*, meliputi:

- pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan I
- pelaksanaan RKBMD Tahun 2027

8. Sasaran Kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu, Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini yaitu *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*, meliputi:
- Desk penyusunan SKP Triwulanan Tahun 2026
  - Penyediaan data nominatif pegawai
  - Penyediaan data kepangkatan dan berkala pegawai
  - Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran, Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Administrasi Umum Perangkat Daerah*, meliputi:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1 Paket)
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 Paket)
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1 Paket)
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1 Paket)
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket)
  - Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (3 laporan)
10. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan, Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini yaitu *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*, meliputi:
- Pengadaan peralatan dan mesin seperti Pembelian Laptop, Printer dan AC
11. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi, Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, meliputi:
- penyediaan Jasa Surat Menyurat (3 laporan)
  - penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3 laporan)
  - penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (4 laporan)
12. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara, Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, meliputi:
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

13. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan belum terlaksana, kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*, kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026.
14. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana, Program yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*, meliputi:
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15. Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat , Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*, meliputi:
- Pelaksanaan Pra Musrenbang Tematik Stunting
  - Kecamatan Sehat (KKS)
16. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana, Program yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*, meliputi:
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
17. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*, meliputi:
- Koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pra musrenbang Kecamatan pada tanggal 15 Januari 2026.
  - Koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan musrenbang Kecamatan pada tanggal 19 Januari 2026.

- Koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan rakor PKK.
- Pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi digisalur di Kecamatan.
- Pelaksanaan fasilitasi pembuatan surat rekomendasi penyaluran DD/ADD.
- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi berkaitan dengan data UMKM di Kecamatan Simpang Empat.
- Pelaksanaan Koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan Pasar Murah Ramadhan di Kecamatan Simpang Empat.
- Pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Simpang Empat.
- Pelaksanaan Koordinasi dengan Pihak Swasta (PT. Talenta Bumi) berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Simpang Empat.

18. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti, Kegiatan yang mendukung kinerja sasaran ini yaitu *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*, meliputi:

- Pelaksanaan tindak lanjut Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa

19. Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti, program yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, sasaran kinerja ini belum dapat disampaikan pada triwulan I karena kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV.

20. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, sasaran kinerja ini belum dapat disampaikan pada triwulan I karena kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III.

21. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti, Kegiatan yang mendukung kinerja sasaran ini yaitu *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, meliputi:

- Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan urusan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan Simpang Empat. Terdapat pengaduan yang telah ditindaklanjuti yaitu

berkaitan dengan informasi kebencanaan dari desa yang telah ditindaklanjuti dengan meneruskan ke BPBD Kabupaten Banjar.

22. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*, sasaran kinerja ini belum dapat disampaikan pada triwulan III karena kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

23. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan, Program yang mendukung kinerja sasaran ini yaitu *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*, meliputi:

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

24. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*, meliputi:

- Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan apel hari kesadaran dan apel gabungan
- Pelaksanaan kegiatan Rakor Forkopimcam
- Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Safari Ramadhan

25. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti, Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*, meliputi:

- Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

26. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik, Program yang mendukung sasaran kinerja ini yaitu *Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*, meliputi:

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

27. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja yaitu Fasilitasi, *Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*, meliputi:

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

#### A.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

##### 1. Rekomendasi

Rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan I Tahun 2026 Kecamatan Simpang Empat, adalah sebagai berikut :

- Maksimalkan serapan anggaran pada triwulan berikutnya.
- Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di masing-masing seksi/subbag secara berkala
- Himpun data kedalam suatu wadah untuk memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat.

##### 2. Tindak Lanjut

Pada Triwulan IV Tahun 2025, berdasarkan hasil LHE Sakip Kecamatan Simpang empat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh inspektorat beserta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut	Bukti/Dokumen Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan
1	Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu pada <a href="https://esakip.banjarkab.go.id">https://esakip.banjarkab.go.id</a> dan <a href="https://esr.menpan.co.id">https://esr.menpan.co.id</a> .	Telah dipublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu pada <a href="https://esakip.banjarkab.go.id">https://esakip.banjarkab.go.id</a> dan <a href="https://esr.menpan.co.id">https://esr.menpan.co.id</a> .	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DRwlpCwx5AkYQGQRtYvvYn9Xm9tsbPEaw?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1DRwlpCwx5AkYQGQRtYvvYn9Xm9tsbPEaw?usp=sharing</a>	Triwulan I 2026
2	Melakukan internalisasi SAKIP kepada setiap Pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;	Rapat Internal dan dialog kinerja dalam rangka internalisasi SAKIP kepada setiap Pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1I_iouhiwAsgvEmA9M0rgTPPuVYY431ra?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1I_iouhiwAsgvEmA9M0rgTPPuVYY431ra?usp=sharing</a>	Triwulan I 2026
3	Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran kinerja yang disertai dengan analisis yang memadai berdasarkan data dukung yang handal.	Telah digunakan aplikasi Simondalev pada menu e-sakip dan validasi dimana aplikasi ini merupakan aplikasi pengukuran kinerja yang disertai dengan analisis yang memadai dan data dukung yang handal	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Vjw3IPFkIx6BF8mbOZ40us00cDPID-FM?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Vjw3IPFkIx6BF8mbOZ40us00cDPID-FM?usp=sharing</a>	Triwulan I 2026
4	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment.	telah dilaksanakan pengukuran kinerja setiap triwulan yang kemudian dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/137NnswAGKXr_K4YhldEIfbsRRuqhGrN?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/137NnswAGKXr_K4YhldEIfbsRRuqhGrN?usp=sharing</a>	Triwulan I 2026

5	Melakukan reviu berjenjang terhadap pelaporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan komitmen dalam mencapai kinerja berikutnya;	Telah dilaksanakan reviu berjenjang terhadap pelaporan kinerja triwulanan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan komitmen dalam mencapai kinerja berikutnya	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ETaN-zKxIRZH9TIDjofjZ9-fsQr599Ep?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ETaN-zKxIRZH9TIDjofjZ9-fsQr599Ep?usp=sharing</a>	Triwulan I 2026
6	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal dan dilakukan secara mendalam, berjenjang dan berkelanjutan.	Telah dilaksanakan Rapat internal dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal dan dilakukan secara mendalam, berjenjang dan berkelanjutan.	Selesai	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1S83nSnXBJBhynQ0ihzLnV8_rCt9xNyis?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1S83nSnXBJBhynQ0ihzLnV8_rCt9xNyis?usp=sharing</a>	Triwulan I 2026

## 2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan I	Realisasi Triwulanan I	Capaian (%)	Target Triwulanan I	Realisasi Triwulanan I	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	NA	43.931.000	37.155.000	84,58
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	NA	NA	NA	43.931.000	37.155.000	84,58
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	814.020.500	623.785.145	76,63
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	NA	NA	NA	814.020.500	623.785.145	76,63
5	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	30%	30%	100%	7.883.000	7.883.000	100,00
6	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	25%	25%	100%	493.430.000	418.521.963	84,82
7	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	25%	25%	100%	2.510.000	2.510.000	100,00
8	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	25%	25%	100%	840.000	25.795.000	3070,83
9	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Admistrasi Umum Perkantoran	25%	25%	100%	109.073.500	4.748.000	4,35
10	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	85%	85%	100%	89.954.000	74.710.384	83,05
11	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	25%	25%	100%	53.650.000	38.186.933	71,18
12	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	25%	25%	100%	56.680.000	15.133.877	26,70
13	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0%	0%	NA	-	-	NA
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	25%	25%	100%	13.116.000	6.475.000	49,37

	Penyelenggaraan Pelayanan	Pelayanan yang terlaksana						
15	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25%	25%	100%	13.116.000	6.475.000	49,37
16	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	81,25%	81,25%	100%	18.430.000	18.430.000	100,00
17	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	81,25%	81,25%	100%	18.430.000	18.430.000	100,00
18	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	81,25%	81,25%	100%	NA	NA	NA
19	Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	0%	0%	NA	-	-	NA
20	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	0%	NA	-	-	NA
21	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	0%	0%	NA	NA	NA	NA
22	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0%	0%	NA	NA	NA	NA
23	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	12,50%	12,50%	100%	7.090.000	6.955.000	98,10
24	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12,50%	12,50%	100%	7.090.000	6.955.000	98,10
25	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	12,50%	12,50%	100%	NA	NA	NA
26	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	18,75%	18,75%	100%	5.295.000	5.295.000	100,00
27	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18,75%	18,75%	100%	5.295.000	5.295.000	100,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Simpang Empat pada Triwulan I tahun 2026, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian terhadap sasaran yang menjadi IKU Kecamatan Simpang Empat belum dapat disampaikan karena belum dilaksanakan penilaian terhadap 3 (tiga) sasaran yang dimaksud yaitu:
  - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - b. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan
  - c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, terdapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Simpang Empat, dengan masing-masing pengampu telah menyampaikan laporan kinerjanya triwulan I tahun 2026 secara berjenjang.
3. Secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Simpang Empat triwulan I Tahun 2026 telah berhasil mencapai target. Penyebab keberhasilan tersebut antara lain:
  - Koordinasi dan Kolaborasi yang Baik, Sinergi yang kuat dengan desa, dinas teknis, dan mitra lainnya.
  - Monitoring dan Evaluasi Rutin, Evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memperbaiki kekurangan.

#### **4.2. Saran**

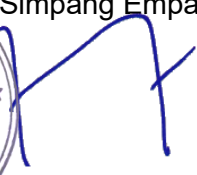
Berdasarkan kesimpulan diatas, didapatkan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Agar terus meningkatkan kinerja Kecamatan Simpang Empat di triwulan berikutnya sesuai dengan rencana aksi.
2. Melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisien agar serapan anggaran dapat maksimal serta evaluasi kinerja pada triwulan I agar pelaksanaan pada Triwulan berikutnya dapat berjalan optimal dan tercapai sesuai target.

Simpang Empat, 6 April 2026

Camat Simpang Empat,



  
Drs. Jurji Zaidan, M.Si  
Pembina TK. I / IVB  
NIP.196904071990101001

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Aksi



## PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. JURJI Z Aidan, M.Si  
Jabatan : Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom  
Jabatan : Bupati Banjar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 07 Januari 2026

Pihak Kedua  
Bupati Banjar



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Pihak Pertama,  
Camat Simpang Empat,  
Kabupaten Banjar,



Drs. JURJI Z Aidan, M.Si  
NIP. 19690407 199010 1 001

*Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.*



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,50
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.485.242.400
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.174.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 78.409.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 11.910.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 191.120.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 34.030.000

Martapura, 07 Januari 2026

Pihak Kedua  
Bupati Banjar



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Pihak Pertama,  
Camat Simpang Empat,  
Kabupaten Banjar,



Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si  
NIP. 19690407 199010 1 001

*Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.*





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR AINA, S.Pi, MP  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Simpang Empat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si  
Jabatan : Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat Simpang Empat,



Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 19690407 199010 1 001

Simpang Empat, 1 April 2026  
Pihak Pertama  
Sekretaris Kecamatan Simpang Empat,



NUR AINA, S.Pi, MP  
Pembina/IVA  
NIP 19730614 199803 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
SEKRETARIS KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	96,00

**Program**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota

**Anggaran**

Rp2.485.242.400,00

Pihak Kedua  
Camat Simpang Empat,



Drs. JURJI Z Aidan. M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 196904071990101001

Simpang Empat, 1 April 2026  
Pihak Pertama  
Sekretaris Kecamatan Simpang Empat,



NUR AINA, S.Pi, MP  
Pembina/IVA  
NIP 19730614 199803 2 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD MAULADI, S.Pt  
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. JURJI Z Aidan, M.Si  
Jabatan : Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
CAMAT SIMPANG EMPAT,

  
Drs. JURJI Z Aidan, M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 196904071990101001

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

  
MUHAMMAD MAULADI, S.Pt  
Penata Tingkat I/IIID  
NIP. 196806161991031010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100%
2	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp26.494.000,00
2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Rp82.474.000,00

Pihak Kedua  
Camat Simpang Empat,

  
Drs. JURJI Z AIDAN, M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 196904071990101001

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,

  
MUHAMMAD MAULADI, S.Pt  
Penata Tingkat I/IIID  
NIP. 196806161991031010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NORIFAI. S.Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si  
Jabatan : Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat Simpang Empat,

  
Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 196904071990101001

Simpang Empat, 1 April 2026  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Pemerintahan,

  
NORIFAI. S.Sos  
Penata Muda TK I/IIIB  
NIP. 197005122009061008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitas urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100%
2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%
3	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%
5	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp86.096.000,00
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp22.550.000,00
3	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp3.410.000,00
4	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp3.410.000,00
5	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp20.390.000,00
6	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp3.410.000,00
7	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp3.410.000,00

Pihak Kedua  
Camat Simpang Empat,

  
Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 196904071990101001

Simpang Empat, 1 April 2026  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Pemerintahan,

  
NORIFAI. S.Sos  
Penata Muda TK I/IIIB  
NIP. 197005122009061008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDA KASWANDA, S.Sos  
Jabatan : Plt Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. JURJI Z Aidan, M.Si  
Jabatan : Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat Simpang Empat,

Drs. JURJI Z Aidan, M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 196904071990101001

Simpang Empat, 1 April 2026  
Pihak Pertama  
Plt Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban,

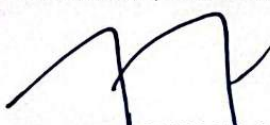
RIDA KASWANDA, S.Sos  
Penata Muda/IIIA  
NIP. 19701022 2009061002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**Pt KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**  
**KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%
2	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
3	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	100%
4	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Rp3.970.000,00
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Rp3.970.000,00
3	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp3.970.000,00

Pihak Kedua  
 Camat Simpang Empat,

  
 Drs. JURJI Z AIDAN, M.Si  
 Pembina Tingkat I/IVB  
 NIP. 196904071990101001

Simpang Empat, 1 April 2026  
 Pihak Pertama  
 Pt Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban,

  
 RIDA KASWANDA, S.Sos  
 Penata Muda/IIIA  
 NIP. 197010222009061002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHAEZAR KUSUMA WARDHANA, ST  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. JURJI Z Aidan, M.Si  
Jabatan : Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat Simpang Empat,



Drs. JURJI Z Aidan, M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 196904071990101001

Simpang Empat, 1 April 2026  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,



KHAEZAR KUSUMA WARDHANA, ST  
Penata Muda TK I/IIID  
NIP. 198612142011011004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %
2	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %
3	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang Ditindaklanjuti	100%

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp14.230.000,00
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp64.179.000,00

Pihak Kedua  
Camat Simpang Empat,

  
Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 196904071990101001

Simpang Empat, 1 April 2026  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

  
KHAEZAR KUSUMA WARDHANA, ST  
Penata Muda TK-III/D  
NIP. 198612142011011004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOOR' AIDA, S.A.P  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : ERENA NOVIANTY, S.Pi  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Simpang Empat

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Sekretaris Kecamatan Simpang Empat,

  
ERENA NOVIANTY, S.Pi  
Pembina/IVA  
NIP 197411221999032007

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan  
Aset,

  
NOOR' AIDA, S.A.P  
Penata Muda TK I/IIIB  
NIP 198503162015032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR**

NO.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100%

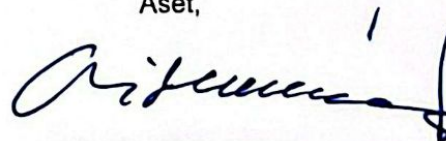
No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp3.486.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp2.080.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2.080.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp2.460.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp1.860.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.860.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.080.000,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.785.600.000,00
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp44.080.000,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp2.660.000,00
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp3.880.000,00
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp1.540.000,00

Pihak Kedua  
 Sekretaris Kecamatan Simpang Empat,



ERENA NOVIANTY. S.Pi  
 Pembina/IVA  
 NIP. 197411221999032007

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
 Pihak Pertama  
 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan  
 Aset,



NOOR' AIDA. S.A.P  
 Penata Muda TK I/IIIB  
 NIP. 198503162015032002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULI HARTININGSIH  
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NORIFAI, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Sub Bagian Umum Dan  
Kepegawaian,

  
NORIFAI, S.Sos  
Penata Muda/IIIB  
NIP. 19700512 200906 1 008

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Pengadministrasi Kepegawaian,

  
YULI HARTININGSIH  
Pengatur/IIC  
NIP.19790726 201406 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
SEKRETARIAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR**

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengaduan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan	9 Dok
2	Tersedianya Prasarana Teknologi Informasi	Jumlah Prasarana Teknologi Informasi yang tersedia	2 Lap
3	Tersedianya Data yang dikelola	Jumlah Data yang dikelola	1 Data

Pihak Kedua  
Kepala Sub Bagian Umum Dan  
Kepegawaian,



NORIFA, S.Sos  
Penata Muda TK I/IIIB  
NIP. 19700512 200906 1 008

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Pengadministrasi Kepegawaian,



YULI HARTININGSIH  
Pengatur/IIC  
NIP.19790726 201406 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI MAIMUNAH, S.Pd  
Jabatan : Perencana Ahli Pertama

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOOR AIDA, S.AP  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan  
dan Aset,

NOOR' AIDA, S.A.P  
Penata Muda TK I/IIIB  
NIP. 198503162015032002

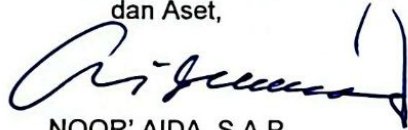
Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Perencana Ahli Pertama,

SITI MAIMUNAH, S.Pd  
Golongan IX  
NIP. 199503242024212018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
PERENCANA AHLI PERTAMA  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR**

NO.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10 Dokumen
2	Terlaksananya Penginputan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang Terinput Sesuai Ketentuan	5 aplikasi
3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Triwulan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulan Perangkat Daerah	4 Laporan
4	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Laporan

Pihak Kedua  
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan  
dan Aset,



NOOR' AIDA, S.A.P  
Penata Muda TK I/IIIB  
NIP. 198503162015032002

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Perencana Ahli Pertama,



SITI MAIMUNAH, S.Pd  
Golongan IX  
NIP. 199503242024212018



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL RAJAK, SE  
Jabatan : Penata Layanan Operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOOR' AIDA, S.AP  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan  
Masyarakat,

NOOR' AIDA, S.AP  
Penata Muda TK I/IIIB  
NIP. 198503162015032002

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Penata Layanan Operasional Seksi  
Pemberdayaan Masyarakat,

ABDUL RAJAK, SE  
NIPPPKPW. 198911152025211140

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT**  
**KABUPATEN BANJAR**

NO.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	2 Laporan
2	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Posyandu	Jumlah Laporan kegiatan Pembinaan Posyandu	1 Laporan
3	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pembinaan Bumdes	Jumlah laporan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Bumdes	1 Laporan
4	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kopdes	Jumlah laporan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kopdes	1 Laporan
5	Terlaksananya kegiatan Pembinaan/Pengembangan UMKM	Jumlah laporan kegiatan Pembinaan/Pengembangan UMKM	1 Laporan

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan  
Masyarakat,



NOOR' AIDA, S.AP  
Penata Muda TK I/IIIB  
NIP. 198503162015032002

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Penata Layanan Operasional Seksi  
Pemberdayaan Masyarakat,



ABDUL RAJAK, SE  
NIPPPKPW. 198911152025211140



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAIRIAH, S.Sos  
Jabatan : Penata Layanan Operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIDA KASWANDA, S.Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban,      Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Penata Layanan Operasional Seksi Ketenteraman  
dan Ketertiban,

RIDA KASWANDA, S.Sos  
Penata Muda/IIIA  
NIP. 19701022 200906 1 002

HAIRIAH, S.Sos  
NIPPPKPW 198505252025212139

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT**  
**KABUPATEN BANJAR**

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terlaksananya Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban bagi LINMAS Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban bagi LINMAS Desa	1 Laporan
2	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi FKUB	Jumlah Laporan kegiatan Rapat Koordinasi FKUB	1 Laporan
3	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan

Pihak Kedua  
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban,



RIDA KASWANDA, S.Sos  
Penata Muda/IIIA  
NIP. 19701022 200906 1 002

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Penata Layanan Operasional Seksi Ketenteraman  
dan Ketertiban,



HAIRIAH, S.Sos  
NIPPPKPW.198505252025212139



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANNISA HILDAWATI, S.Pd  
Jabatan : Penata Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NORIFAI, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Simpang Empat, 2 Januari 2026

Pihak Kedua  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian,

Pihak Pertama  
Penata Layanan Operasional Sub Bagian Umum  
dan Kepegawaian,

NORIFAI, S.Sos  
Penata Muda Tk. I/IIIb  
NIP. 19700512 200906 1 008

ANNISA HILDAWATI, S.Pd  
NIPPPKPW 19940102 202521 2 144

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR**

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terlaksananya pencatatan surat masuk dan surat keluar	Jumlah Laporan pencatatan surat masuk dan surat keluar	12 Laporan
2	Terlaksananya kegiatan Hemat energi dan air kecamatan Simpang Empat	Jumlah Laporan Penghematan Energi dan Air Kecamatan Simpang Empat semester I dan II Tahun 2026	2 Laporan
3	Terlaksananya penataan arsip Kecamatan Simpang Empat berdasarkan klasifikasi dan kode indeks	Jumlah Laporan Penataan Arsip Kecamatan Simpang Empat berdasarkan klasifikasi dan kode indeks	2 Laporan
4	Terlaksananya penyusunan arsip secara berkala dan tepat waktu	Jumlah Laporan kearsipan semesteran	2 Laporan

Pihak Kedua  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian,



NORIFAI, S.Sos  
Penata Muda Tk. I/IIIb  
NIP. 19700512 200906 1 008

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Pihak Pertama  
Penata Layanan Operasional Sub Bagian Umum  
dan Kepegawaian,



ANNISA HILDAWATI, S.Pd  
NIPPPKPW 19940102 202521 2 144

**RENCANA AKSI TAHUN 2026**  
**KECAMATAN SIMPANG EMPAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)	Nilai	90,5	-	-	-	90,5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	Persen	100	25	50	75	100	Rp 28.174.000	Rp 13.116.000	Rp 9.788.000	Rp 2.750.000	Rp 2.520.000	Kasi Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	100	-	-	-	100	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	25	50	75	100	Rp 26.494.000	13.116.000	8.108.000	2.750.000	2.520.000	
									Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	1	1	1	1	Rp 26.494.000	13.116.000	8.108.000	2.750.000	2.520.000	
									Pra Musrenbang Tematik Stunting	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pra Musrenbang Tematik Stunting		2	2	-	-	-	Rp 5.980.000	5.980.000	-	-	-		
									Kecamatan Sehat (KKS)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Sehat (KKS)		12	3	3	3	3	Rp 11.230.000	3.440.000	2.520.000	2.750.000	2.520.000		
									Rapat Koordinasi Aksi Bangsa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Aksi Bangsa		3	2	1	-	-	Rp 5.544.000	3.696.000	1.848.000	-	-		
									Rapat Koordinasi Puskesmas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rakor Puskesmas		1	-	1	-	-	Rp 3.740.000	-	3.740.000	-	-		
									Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100	0	100	100	100	Rp 1.680.000	Rp -	Rp 1.680.000	Rp -	Rp -	Kasubbag Umpeg
									Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	0	2	0	0	Rp 1.680.000	-	1.680.000	-	-	
									Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		2	0	2	0	0	Rp 1.680.000	Rp -	Rp 1.680.000	Rp -	Rp -		
									<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100	81,25	87,50	93,25	100	Rp 78.409.000	Rp 18.430.000	Rp 21.860.000	Rp 33.919.000	Rp 4.200.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Persen	100	81,25	87,50	93,25	100	Rp 78.409.000	Rp 18.430.000	Rp 21.860.000	Rp 33.919.000	Rp 4.200.000	
									Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persen	100	81,25	87,50	93,25	100	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
									Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	0	0	0	Rp 14.230.000	Rp 14.230.000	Rp -	Rp -	Rp -	
									Pelaksanaan Kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kecamatan	Jumlah LK yang berpartisipasi dalam kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang		Lembaga Kemasyarakatan	6	6	0	0	0	Rp 5.830.000	Rp 5.830.000	Rp -	Rp -	Rp -	
									Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Jumlah LK yang berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang		Lembaga Kemasyarakatan	6	6	0	0	0	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000	Rp -	Rp -	Rp -	
									Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	1	3	1	1	Rp 64.179.000	Rp 4.200.000	Rp 21.860.000	Rp 33.919.000	Rp 4.200.000	
									Pembinaan PKK	Jumlah Laporan Pembinaan PKK		Laporan	12	3	3	3	3	Rp 31.511.000	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000	Rp 18.911.000	Rp 4.200.000	
									Monev / Evaluasi APBDes	Jumlah Laporan Monev/Evaluasi APBDes		Laporan	1	0	0	1	0	Rp 15.008.000	Rp -	Rp -	Rp 15.008.000	Rp -	
									Pembinaan Posyandu	Jumlah Laporan Pembinaan Posyandu		Laporan	1	0	1	0	0	Rp 2.240.000	Rp -	Rp 2.240.000	Rp -	Rp -	
									Pembinaan/Pengembangan UMKM	Jumlah Laporan Pembinaan/Pengembangan UMKM		Laporan	1	0	1	0	0	Rp 5.140.000	Rp -	Rp 5.140.000	Rp -	Rp -	
									Fasilitasi Pembinaan Bumdes	Jumlah Laporan Pembinaan Bumdes		Laporan	1	0	1	0	0	Rp 5.140.000	Rp -	Rp 5.140.000	Rp -	Rp -	
									Fasilitasi Pembinaan Kopdes	Jumlah Laporan Pembinaan Kopdes		Laporan	1	1	0	0	0	Rp 5.140.000	Rp -	Rp 5.140.000	Rp -	Rp -	
									<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	0	33	66	100	Rp 11.910.000	Rp -	Rp 3.970.000	Rp 3.970.000	Rp 3.970.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
									Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	0	50	100	100	Rp 7.940.000	Rp -	Rp 3.970.000	Rp 3.970.000	Rp -	
									Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	0	50	100	100							
									Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	0	0	1	0	Rp 3.970.000	Rp -	Rp -	Rp 3.970.000	Rp -	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab
					TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
									Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa	Dokumen	1	0	1	0	0	Rp 3.410.000	Rp -	Rp 3.410.000	Rp -	Rp -		
									Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	12	3	3	3	3	Rp 20.390.000	Rp 5.270.000	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000		
									Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Rakor Kecamatan	Dokumen	12	3	3	3	3	Rp 20.390.000	Rp 5.270.000	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000		
									Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 3.410.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.410.000		
									Rapat Koordinasi Pembinaan BPD	Jumlah Dokumen Laporan Rakor Pembinaan BPD	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 3.410.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.410.000		
									Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	0	1	0	0	Rp 3.410.000	Rp -	Rp 3.410.000	Rp -	Rp -		
									Rakor Fasilitasi Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Laporan Rakor Fasilitasi Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	0	1	0	0	Rp 3.410.000	Rp -	Rp 3.410.000	Rp -	Rp -		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,00	-	-	81,00	-	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah</b>	Nilai	96,00	-	-	-	96,00	Rp 2.485.242.400	Rp 814.020.500	Rp 644.655.000	Rp 511.097.500	Rp 513.726.400	Sekretaris Kecamatan	
									Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persen	100	30,00	55	75	100	Rp 23.586.000	Rp 7.883.000	Rp 4.600.000	Rp 4.380.000	Rp 4.980.000	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
									Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	0	1		Rp 3.486.000	Rp 1.743.000	Rp -	Rp -	Rp -		
									Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2027	Jumlah Dokumen Renja Tahun 2027	Dokumen	1	1	0	0	0	Rp 1.743.000	Rp 1.743.000	Rp -	Rp -	Rp -		
									Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2026	Jumlah Dokumen Renja Perubahan Tahun 2026	Dokumen	1	0	0	1	0	Rp 1.743.000	Rp -	Rp -	Rp 1.743.000	Rp -		
									Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	0	0	0	Rp 2.080.000	Rp 2.080.000	Rp -	Rp -	Rp -		
									Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2027	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2027	Dokumen	1	1	0	0	0	Rp 2.080.000	Rp 2.080.000	Rp -	Rp -	Rp -		
									Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	0	Rp 2.080.000	Rp -	Rp 2.080.000	Rp -	Rp -		
									Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Tahun 2027	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2027	Dokumen	1	0	0	1	0	Rp 2.080.000	Rp -	Rp 2.080.000	Rp -	Rp -		
									Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 2.460.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.460.000		
									Penyusunan Dokumen DPA Tahun 2027	Jumlah Dokumen DPA Tahun 2027	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 2.460.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.460.000		
									Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	0	Rp 1.860.000	Rp -	Rp -	Rp 1.860.000	Rp -		
									Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Tahun 2027	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2027	Dokumen	1	0	0	1	0	Rp 1.860.000	Rp -	Rp -	Rp 1.860.000	Rp -		
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	0	0	0	Rp 1.540.000	Rp 1.540.000	Rp -	Rp -	Rp -		
									Penyusunan Dokumen LKjIP Tahun 2025	Jumlah LKjIP Tahun 2025	Laporan	1	1	0	0	0	Rp 1.540.000	Rp 1.540.000	Rp -	Rp -	Rp -		
									Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	3	3	3	3	Rp 10.080.000	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000		
									Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Bulanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Bulanan	Laporan	12	3	3	3	3	Rp 10.080.000	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000		
									Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persen	100	25	50	75	100	Rp 1.832.340.000	Rp 493.430.000	Rp 490.770.000	Rp 423.570.000	Rp 424.570.000		
									Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	154	44	44	33	33	Rp 1.785.600.000	Rp 480.000.000	Rp 480.000.000	Rp 412.800.000	Rp 412.800.000		
									Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	154	44	44	33	33	Rp 1.785.600.000	Rp 480.000.000	Rp 480.000.000	Rp 412.800.000	Rp 412.800.000		



No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2026				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran/Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2026				Anggaran	Anggaran Periodik				Penanggung Jawab					
					TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV						
									Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	0	0	0	0	0	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
									Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor		Jumlah unit Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	0	0	0	0	0	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
									Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
									Pengadaan Mebel Kantor		Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
									Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	12	1	1	1	Rp	91.994.000	Rp	89.954.000	Rp	680.000	Rp	680.000	Rp	680.000	
									Pengadaan Peralatan dan Mesin		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	12	1	1	1	Rp	91.994.000	Rp	89.954.000	Rp	680.000	Rp	680.000	Rp	680.000	
									Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Persen	100	25	50	75	100	Rp	187.419.600	Rp	53.650.000	Rp	49.500.000	Rp	43.550.000	Rp	40.719.600	
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3	3	3	3	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
									Belanja Materai		Jumlah Laporan Surat Menyurat	Laporan	12	3	3	3	3	Rp	1.200.000	Rp	1.200.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	3	Rp	20.119.600	Rp	7.450.000	Rp	4.500.000	Rp	5.500.000	Rp	2.669.600	
									Pembayaran listrik dan air		Laporan Hemat Energi	Laporan	12	3	3	3	3	Rp	20.119.600	Rp	7.450.000	Rp	4.500.000	Rp	5.500.000	Rp	2.669.600	
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	4	3	3	3	Rp	166.100.000	Rp	45.000.000	Rp	45.000.000	Rp	38.050.000	Rp	38.050.000	
									Pembayaran upah tenaga kerja Non ASN, Pembayaran BPJS Kesehatan Non ASN dan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Non ASN		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	4	3	3	3	Rp	166.100.000	Rp	45.000.000	Rp	45.000.000	Rp	38.050.000	Rp	38.050.000	
									Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	25	50	75	100	Rp	111.410.000	Rp	56.680.000	Rp	7.410.000	Rp	25.840.000	Rp	21.480.000	
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	2	2	2	1	Rp	87.760.000	Rp	54.650.000	Rp	4.650.000	Rp	23.810.000	Rp	4.650.000	
									Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	2	2	2	1	Rp	87.760.000	Rp	54.650.000	Rp	4.650.000	Rp	23.810.000	Rp	4.650.000	
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	4	3	3	4	Rp	8.850.000	Rp	2.030.000	Rp	2.760.000	Rp	2.030.000	Rp	2.030.000	
									Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan AC		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	4	3	3	3	Rp	8.850.000	Rp	2.030.000	Rp	2.760.000	Rp	2.030.000	Rp	2.030.000	
									Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	0	0	0	Rp	14.800.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	14.800.000	
									Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Kecamatan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	0	0	0	Rp	14.800.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	14.800.000	



Simpang Empat, 12 Januari 2026

CAMAT

Drs. Jurji Zaidan, M.Si,  
NIP. 196904071990101001